

Hari/Tanggal : Senin, 31 Juli 2023

Waktu : 10.00 WITA-Selesai

**Tempat : Departemen Ilmu Sejarah, Fakultas
Ilmu Budaya**

**PENATAAN ADMINISTRASI PANGKAJENE DI MASA KOLONIAL SAMPAI
AWAL KEMERDEKAAN 1916-1959**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Ujian Guna Memperoleh Gelar Sarjana

Pada Departemen Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya

Universitas Hasanuddin

Disusun:

ERWIN S

F81116302

DEPARTEMEN ILMU SEJARAH

FAKULTAS ILMU BUDAYA

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2023

FAKULTAS ILMU BUDAYA
UNIVERSITAS HASANUDDIN

Pada hari Jumat, 28 Juli 2023, Panitia Ujian Skripsi Departemen Ilmu Sejarah telah menerima dengan baik skripsi yang berjudul:

**PENATAAN ADMINISTRASI PANGKAJENE DI MASA KOLONIAL
1916-1959**

Yang diajukan untuk memenuhi salah satu syarat Ujian Akhir guna memperoleh gelar Sarjana Humaniora pada Departemen Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Hasanuddin.

Makassar, 28 Juli 2023



- | | | |
|--|--------------|--|
| 1. Drs. Dias Pradadimara, M.A., M.S. | Ketua | |
| 2. <u>Dr. Muslimin, A.R. Effendy, M.A.</u> | Sekretaris | |
| 3. Dr. Nahdiah Nur, M.Hum. | Penguji I | |
| 4. Nasihin, S.S., M.A. | Penguji II | |
| 5. Drs. Dias Pradadimara, M.A., M.S. | Konsultan I | |
| 6. <u>Dr. Muslimin, A.R. Effendy, M.A.</u> | Konsultan II | |

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Erwin S

NIM : F81116302

Departemen/Program Studi : Ilmu Sejarah/Strata 1 (S1)

Dengan ini menyatakan yang sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul

PENATAAN ADMINISTRASI PANGKAJENE DI MASA KOLONIAL SAMPAI AWAL KEMERDEKAAN 1916-1959

adalah karya ilmiah saya sendiri. Karya ilmiah ini sebagai syarat untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi (Universitas Hasanuddin). Penulisan karya ilmiah ini sesuai dengan kaidah penulisan akademik. Apabila di kemudian hari ternyata di dalamnya terdapat unsur-unsur plagiarisme dan tidak dapat dibuktikan dengan metode historiografi, saya bersedia menerima sanksi yang berlaku.

Makassar, 31 Juli 2023

Yang membuat Pernyataan



Erwin S

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT, atas seluruh rahmat, berkat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “**Penataan Administrasi Pangkajene di Masa Kolonial 1916-1959**” sebagai salah satu syarat menyelesaikan studi di universitas dan menyanggah gelar sarjana. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasalam, nabi dan rasul penutup yang senantiasa yang menyebarkan tauhid dan kebaikan serta membawa ajaran Islam sebagai petunjuk hidup bagi ummat manusia seluruh alam.

Dibalik penyusunan skripsi ini, terdapat peran besar dan partisipasi banyak pihak yang membantu dan menunjang penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, dengan segenap hati penulis menyampaikan rasa hormat dan ucapan terimakasih yang tak terhingga serta penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Kedua orang tua penulis, Ayahanda **Sahaling** dan Ibunda tercinta **Siarah** yang telah membesarkan dan mendidik penulis. Memberikan dukungan moril dan materil, serta selalu mendoakan kebaikan bagi penulis. Terima kasih kepada ibu atas kasih sayang yang tak terhingga. Kepada bapak yang telah banyak memberikan dukungan dan semangat bagi penulis hingga menyelesaikan studi. Serta terimakasih kepada Kakak **Muhammad Irwan** yang selalu menjadi penyemangat dan selalu menjadi saudara yang terbaik bagi penulis. Sampai penulis menyelesaikan penulisan skripsi ini.
2. **Rektor Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc.**, selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta para wakil rector dan para jajarannya.
3. **Prof. Akin Duli, M.A.**, selaku Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin beserta para Wakil Dekan beserta jajarannya

4. Kedua pembimbing penulis, Bapak **Drs. Dias Pradadimara, M.A., M.S** dan **Dr. Muslimin AR. Effendy, M.A** yang senantiasa membimbing, mengarahkan, meluangkan waktu, memotivasi dan mendorong penulis untuk menyelesaikan skripsi dengan baik.
5. Ketua Jurusan Ilmu Sejarah Bapak **Dr. Ilham, M.Hum**, serta dosen-dosen Ilmu Sejarah, **Dr. Suriadi Mappangara, M.Hum., Ida Liana Tanjung, M.Hum., Dr. Nahdia Nur, M.Hum., M.Hum, Dr. Muh. Bahar Akkase, Teng., Lep., M.Hum, Dr. Drs. Abd. Rasyid Rahman, M.Ag, Dr. Amrullah Amir, S.S., MA., A. Lili Evita, S.S., Dr. Bambang Sulistyoo., M.Hum, Nasihin, S.S., MA Alm. Prof Dr. Rasyid Asba, M.A** dan mendiang Ibu **Margriet Moka Lappia, S.S., M.S.** terimakasih atas ilmu dan bimbingan yang telah diberikan selama penulis menempuh bangku kuliah.
6. Kepada Bapak **Uddji Usman Pati, S.Sos** terima kasih telah membantu dalam pengurusan berkas.
7. Kepada diri saya yang telah bertahan ditengah dan selalu menghidupkan semangat juang dalam jiwa. Dapat melangkah sejauh ini, meskipun tidak mudah. Skripsi ini saya persembahkan untuk jiwa penulis yang tak pernah henti-hentinya berjuang.
8. Kepada Keluarga Besar **Himpunan Mahasiswa Departemen Ilmu Sejarah (HUMANIS KMFIB-UH)**, yang telah menjadi rumah kedua penulis di Makassar, yang mana selalu mewarnai perjalanan penulis di dunia kampus. Terimakasih atas ilmu-ilmu yang diberikan dan pengalaman yang luar biasa berharga, hingga kekeluargaan yang tiada batas.

9. Kepada **Pengurus HUMANIS KMFIB-UH** yang selalu mendukung penulis dalam banyak hal mengenai skripsi ini.
10. Kepada teman-teman **Amanagappa 2016** yang selalu menjadi teman penulis selama bangku kuliah.
11. Kepada **Keluarga Mahasiswa Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin (KMFIB-UH)** yang juga mewarnai hari hari penulis selama berada di kampus.
12. Kepada **Yusrah** yang selalu membantu dan menemani penulis dalam mengerjakan skripsi meskipun kadang memaksa dan mewarnai keseharian penulis.
13. Kepada adik-adik tersayang **Vivin, Ismi, Fika serta yang lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu**, yang selalu menghiasi hari-hari penulis. Selalu menjadi support sistem dan selalu mengingatkan kewajiban penulis untuk menyelesaikan skripsi. Sehingga penulis akhirnya dapat menyelesaikan skripsi.

Penulis menyadari sepenuhnya akan ada kekurangan dalam penyusunan skripsi ini.

Namun, penulis berharap semoga skripsi ini dapat menjadi referensi yang berguna dalam melihat dinamika yang terjadi pada penataan administrasi di Pangkajene sesuai masa yang di tulis.

Makassar, 31 Juli 2023



Erwin S

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Batasan Masalah.....	6
1.3. Rumusan Masalah	7
1.4. Tujuan dan Manfaat.....	7
1.4.1. Tujuan	7
1.4.2. Manfaat	7
1.5. Tinjauan Pustaka	8
1.6. Metode Penelitian.....	10
1.7. Sistematika Penulisan.....	11
BAB II PANGKEP DALAM LINTASAN SEJARAH	15
2.1 Eksistensi Kerajaan Siang	15
2.2. Palili Kerajaan Gowa	18
2.3. Pangkajene Dalam Pengawasan VOC	20
2.4. Pangkajene dalam Pemerintahan Hindia Belanda 1824-1911	23
BAB III PENATAAN ADMINISTRASI DI PANGKAJENE TAHUN 1916-1945	27
3.1. Pangkajene di Masa Kolonial 1916-1942	27
3.1.1. Pangkadjene	30
3.1.2. Mandalle.....	34

3.1.3. Segeri.....	37
3.1.4. Marang	43
3.1.5. Labbakkang.....	44
3.1.6. Boengoro	49
3.1.7. Balotji.....	51
3.2. Pangkajene di Masa Pemerintahan Jepang 1942-1945	53
BAB IV PEMBENTUKAN KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN	54
4.1. Pangkajene Sebelum NKRI (1945-1949).....	58
4.2. Pembentukan Wilayah Pemerintahan Tingkat II Pangkajene dan Kepulauan (1949-1959).....	67
BAB V KESIMPULAN.....	73
DAFTAR PUSTAKA	76
LAMPIRAN-LAMPIRAN	79
Lampiran Administrasi.....	79
Lampiran Arsip	83

ABSTRAK

Erwin S, Nomor Induk Mahasiswa F81116302, dengan judul “Penataan Administrasi Pangkajene Di Masa Kolonial 1916-1959”, dibawah bimbingan Drs. Dias Pradadimara, M.A., M.S dan Dr. Muslimin A.R. Effendy, M.A.

Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki dan menganalisa penataan administrasi di Pangkajene pada rentang waktu tahun 1916 hingga 1959. Fokus penelitian ini adalah memahami perubahan dan perkembangan struktur administrasi di daerah tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan sejarah dan mengandalkan sumber-sumber primer seperti arsip, dokumen resmi, catatan administrasi dan laporan pemerintah.

Metode penelitian yang digunakan adalah analisis historis, yang melibatkan penelusuran kronologis perubahan administrasi di Pangkajene selama periode yang diteliti. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan tentang sistem administrasi kolonial yang diterapkan oleh pemerintah saat itu dan dampaknya terhadap perkembangan wilayah Pangkajene.

Temuan ini menunjukkan bahwa pada awal periode penelitian, Pangkajene merupakan wilayah yang masih tergolong ke dalam daerah-daerah terpencil yang belum sepenuhnya terintegrasi dalam administrasi kolonial. Namun, selama rentang waktu yang diteliti, terjadi perubahan signifikan dalam penataan administrasi di Pangkajene, seperti pembentukan pemerintah local dan pengaturan sistem birokrasi. Penelitian ini juga menyoroti faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan administrasi di Pangkajene. Penelitian ini membahas implikasi dari penataan administrasi tersebut terhadap masyarakat Pangkajene.

Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi penting terhadap pemahaman tentang sejarah penataan administrasi di Pangkajene tahun 1916 hingga 1959. Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi penting bagi peneliti, sejarawan, dan pemerhati sejarah lokal dalam menggali dan memahami perkembangan administrasi di daerah ini serta pengaruhnya dalam konteks kolonial.

Kata Kunci : Pangkajene, Penataan administrasi, Kolonial

ABSTRACT

Erwin S, Student Identification Number F81116302, with the title "Administrative Arrangement of Pangkajene in the Colonial Period 1916-1959", under the guidance of Drs. Dias Pradadimara, M.A., M.S and Dr. Muslimin A.R. Effendy, M.A.

This study aims to investigate and analyze the administrative arrangements in Pangkajene from 1916 to 1959. The focus of this research is to understand the changes and developments in the administrative structure in the area. This research was conducted using a historical approach and relying on primary sources such as archives, official documents, administrative records and government reports.

The research method used is historical analysis, which involves tracing chronologically the administrative changes in Pangkajene during the period under study. The results of this study are expected to provide insight into the colonial administration system implemented by the government at that time and its impact on the development of the Pangkajene region.

These findings indicate that at the beginning of the research period, Pangkajene was an area that was still classified as remote areas that had not been fully integrated into the colonial administration. However, during the time span examined, there have been significant changes in the administrative arrangement in Pangkajene, such as the formation of the local government and the arrangement of the bureaucratic system. This study also sheds light on the factors influencing administrative changes in Pangkajene. This study discusses the implications of this administrative arrangement for the Pangkajene community.

Thus, this research makes an important contribution to the understanding of the history of administrative arrangements in Pangkajene from 1916 to 1959. The results of this research can be an important reference for researchers, historians and observers of local history in exploring and understanding the development of administration in this area and its influence in the colonial context.

Keywords: Pangkajene, Administrative Arrangement, Colonial

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan terletak di pesisir pantai barat Provinsi Sulawesi Selatan. Posisinya berada di 4°-40' Lintang Selatan sampai 8°-00' Lintang Selatan dan 110° Bujur Timur sampai 119°48'67'' Bujur Timur dengan luas 1.112,29 km². Batas sebelah utara Kabupaten Barru, selatan Kabupaten Maros, Makassar, timur Kabupaten Bone dan Kabupaten Maros serta barat Provinsi Kalimantan Timur, Jawa Timur, Madura, Nusa Tenggara Barat dan Bali/ Selatan Makassar.¹

Pada masa Pemerintahan Hindia Belanda di awal abad ke-20, awalnya Pangkajene pada *Staadblad* 1916 terdiri dari lima distrik kekarraengan yaitu: Segeri; Ma'rang; Labakkang; Pangkajene; dan Balocci. Kemudian setelah surat penetapan Gubernur Sulawesi Selatan tertanggal 13 Juli 1918 No. 124/XIX daerag Pangkajene dibagi menjadi tujuh daerah kekarraengan yaitu: Mandalle; Segeri; Ma'rang; Labakkang; Bungoro; Pangkajene; dan Balocci.² Sebelumnya Pemerintah Hindia Belanda sudah pernah melakukan perubahan tata adminsitrasi sejak abad ke-17.

Berdasarkan Perjanjian Bungaya 1667, secara *dejure* wilayah Sulawesi Selatan secara keseluruhan adalah wilayah pengaruh kekuasaan Belanda, yang disebut Makassar dan daerah taklukannya (*Makassar en onderhoorigheden*). Pada

¹ <https://sulsel.bpk.go.id/profil-kabupaten-pangkejene-dan-kepulauan/>. Di akses pada 21 Mei 2023, pukul 20:23.

² Abdul Razak Daeng Patunru, *Bingkisan Patunru Sejarah Lokal Sulawesi Selatan*, (Makassar: Pusat Kajian Indoneisa Timur, 2004) hlm. 33-34.

saat itu Pengkajene sudah berada dalam wilayah pemerintahan dan kekuasaan langsung. Pembagian wilayah pada masa itu dibagi kedalam tiga kategori. Pertama adalah daerah yang berada dalam pemerintahan dan kekuasaan langsung pemerintah Belanda yang disebut *gouvernements landen*, yang meliputi: distrik Makassar, distrik-distrik Bagian Utara (Maros dan Pangkajene), distrik-distrik Bagian Selatan (Bantaeng, Bulukumba dan Selayar). Kategori kedua adalah daerah kekuasaan pemerintah yang tidak dibawah pemerintahan langsung. Kedudukan kekuasaan dipinjamkan kepada pemerintah lokal, sesuai dengan tradisi kehidupan politiknya. Dalam hal inilah wilayah pemerintahan itu sering disebut juga “kerajaan pinjaman” (*Leenvorstendom*). Kerajaan yang masuk kategori ini adalah Kaili (sekarang donggala), Pare-pare, Tanete, Tallo, Wajo dan Laiwui. Kategori yang terakhir adalah kerajaan-kerajaan sekutu (*bondgenootschappelijke landen*).³

Masa VOC dipandang memiliki kekuasaan terhadap sebagian dari wilayah di daerah itu hanya karena perjanjian yang telah dicapai. Kegiatan pemerintahan tidak pernah dilaksanakan. Demikian juga pada masa Pemerintahan Hindia Belanda pada abad ke-19. Pemerintahan Hindia Belanda tidak pernah melakukan kegiatan pemerintahan yang seutuhnya dan langsung, kecuali hanya melaksanakan pengawasan terhadap kegiatan politik dari penguasa-penguasa setempat.⁴

³ M. Tamrin Mattulada, *Kuasa Penjajah: Imprealisme Belanda di Kerajaan Bone 1906-1931*, (Makassar: Pustaka Saweri Gading, 2015), hlm. 31-32.

⁴ Edward L Poelinggomang, *Perubahan Politik dan Hubungan Kekuasaan Makassar 1906-194*, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2004). hlm. 2-4

Kebangkrutan VOC pada akhir abad ke-18, membuat semua wilayah jajahannya dialih kuasa kepada Kerajaan Belanda.⁵ Kekuasaan kerajaan Belanda tidak bertahan lama setelah kekuasaannya diambil alih oleh perancis pada saat itu dan kemudian diambil alih oleh Inggris pada tahun 1811 setelah Belanda kalah dalam peperangan di pulau Jawa. Barulah pada 1824, Belanda berhasil mengambil kembali kekuasaannya di wilayah Nusantara setelah melakukan perjanjian damai dengan Inggris yang kembali mengukuhkan kekuasaannya di daerah-daerah yang telah di taklukkan oleh VOC sebelumnya. Untuk membina kembali kekuasaannya di Sulawesi Selatan yang telah ditinggalkan oleh Inggris, maka Belanda kembali mengundang kerajaan-kerajaan lokal untuk memperbarui Perjanjian Bungaya yang diadakan pada 31 Juli 1824 di Makassar.

Kedudukan Maros dan Pangkajene sebagai wilayah Provinsi, dalam perkembangannya diubah menjadi *Norder Districten* (Distrik-distrik Bagian Utara). Demikian pula halnya dengan Provinsi Bagian Utara diubah menjadi *Zuider Districten*. Rincian wilayah ketika itu tidak jelas dalam hubungan dengan pejabat lokal. Penataan tercantum dalam Lembaran Negara (*Staadblad*) pada tahun 1824 (Lembaran Negara 1824 Nomor 31a). Dalam lembaran Negara ini, Distrik-Distrik yang tergabung pada Distrik-Distrik Bagian Utara itu meliputi: Maros; Bontoa; Tangkutu; Tanralili; Sumbang; Rilau; Tomboro; Riraya; Sudiang; Malawa; Camba; Baloci; Kaiya; Labuaya; Bungoro; Pangkajene; Bungoro; Labakang; Marang; Kalukua; Sigeri dan Katene. Secara administratif wilayah-wilayah distrik itu berada

⁵ Abd. Latif dan Nordin Hussin, *Sejarah dan Politik Kerajaan Bugis Kedinamikan Konfederasi Ajatappareng di Sulawesi Selatan 1912-1906*, (Kuala Lumpur: Cetak Jitu Sdn.Bhd, 2015), hlm.32.

dalam kekuasaan langsung pemerintah Hindia Belanda, namun dalam kenyataannya tidak demikian, dengan alasan kekurangan tenaga administrasi. Oleh karena itu, di bawah Gubernur yang menjadi kepala pemerintahan Pemerintahan Makassar dan Daerah Bawahannya (*Gouvernement Makassar en Onderhorigheden*) hanya ada residen yang ditempatkan pada lima wilayah kekuasaan langsung yaitu: Makassar, Distrik-distrik di Bagian Selatan, Distrik-Distrik di Bagian Utara, Bulukumba dan Bantaeng dan Selayar. Residen didampingi oleh seorang juru bicara (tolk) dan sejumlah polisi.⁶

Pada tahun 1857 Pemerintah Belanda melaksanakan pemetaan wilayah. Berdasarkan hasil itu, dilaksanakan perubahan penataan wilayah pemerintahan pada tahun 1860, meskipun dalam bentuk yang beragam sebagai contoh: Makassar dibagi dalam dua afdeling, yaitu *afdeling* Makassar dan *afdeling* Tallo. *Afdeling* Makasar di perintah oleh seorang Asisten Residen sementara *afdeling* Tallo oleh seorang Kontrolir. Untuk daerah *Norder Districten* dijadikan satu afdeling yaitu *Norder Districten*. *Afdeling* selanjutnya dibagi dalam tiga distrik pajak (*pachtdistricte*) yaitu Maros, Pangkajene dan Sigeri, dan Distrik-Distrik Pegunungan. Maros berada langsung di bawah Asisten Residen, sementara dua distrik pajak lainnya berada di bawah Kontrolir.⁷

Berdasarkan luas wilayah bagian pemerintahan Makassar, pada tahun 1917, wilayah bagian pemerintahan Makassar dan Bonthain dibagi menjadi tiga wilayah pemerintahan yaitu Makassar, Sungguminasa dan Bonthain. Bagian pemerintahan

⁶ Edward Poelinggomang, *Mozaik Sejarah Sulawesi Selatan Sulawesi Barat*, (Makassar: Pustaka Sawerigading, 2015), hlm. 154-156.

⁷ *Ibid.*, hlm. 156.

Makassar, berdasarkan perubahan itu terdiri dari tiga cabang pemerintahan yaitu Makassar, Maros dan Pangkajene.⁸ Dalam masa ini, *Onderafdeeling* Pangkajene berada di bawah *Afdeeling* Makassar dan pada saat itu Pangkajene sudah memiliki lima daerah *Kekaraengan* yang kemudian dimekarkan menjadi tujuh *Kekaraengan* pada 1918.⁹ Wilayah kepulauan sebagai bagian dari *Stadsgerente* Makassar, dikepalai oleh Kepala Distrik Makassar yang wilayah meliputi : Pulau – pulau ‘*Spermonde*’ , terdiri dari 57 pulau, *Kalu-kalukuang Group* terdiri dari 8 pulau, *Postelion* dan *Paternoster* terdiri dari 52 pulau. Pulau–pulau tersebut disusun berkelompok disesuaikan jangkauan geografisnya.¹⁰

Kekalahan Belanda atas Jepang menjadikan wilayah kekuasaan Belanda di Asia termasuk Sulawesi Selatan pada khususnya, menjadi kuasa Jepang setelah penandatanganan piagam penyerahan tanpa syarat Angkatan Perang Hindia Belanda ke pihak Jepang di Kalijati pada 8 Maret 1942.¹¹ Pada masa ini hampir tidak ada perubahan administrasi yang terjadi. Perbedaan hanya ada pada perbedaan nama seperti wilayah Pemerintahan *Afdeeling* menjadi *Gun Ken Kanrikan*, jadi pada saat itu Pangkajene berada di wilayah Makassar *Ken Kanrikan*.¹²

Pada masa kemerdekaan Indonesia, wilayah-wilayah yang termasuk dalam wilayah pemerintahan Belanda ikut menjadi daerah di Indonesia dengan penataan

⁸ Dr. Edward L. Poelinggomang, *Hubungan Politik . . .* (2004 : 90).

⁹ Abdul Razak Daeng Patunru, *Bingkisan . . .* (2004 : 34).

¹⁰ Pangkebkab.go.id /sejarah-pangkep/sejarah-pemerintahan-daerah, diakses pada 31 Mei 2024 pukul 22:42 WITA.

¹¹ Edwar L. Poelinggomang, Suriadi Mappangara dkk, *Sejarah Sulawesi Selatan Jilid 2*, (Makassar: Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah, 2005), hlm. 84.

¹² *Ibid.*, hlm. 90.

wilayah yang masih digunakan atau masih sama saat Belanda masih menguasai Indonesia. Namun dalam perkembangannya perubahan bentuk negara menjadikan tatanan politik yang berubah. Pada masa awal kemerdekaan, Sulawesi berada dalam satu Provinsi dengan Gubernur yang ditunjuk saat itu adalah Dr. Ratulangi untuk mengambil alih pemerintahan dari tangan *Minseibu*,¹³ pada masa Negara Indonesia Timur meskipun saat Tjakorde Gde Rake Soekawati menjadi presiden NIT dan dari Belanda Letnan Gubernur H.J. van Mook, Belanda kembali memegang peranan penting dalam dinamika kekuasaan dengan pengaruh yang diberikannya. Kemudian pada masa RIS, kekuasaan Kembali pada Presiden Indonesia namun tetap mengakui presiden NIT dalam bentuk negara serikat.¹⁴ dan akhirnya pada masa NKRI tepatnya pada tahun 1959 Pangkajene saat itu di jadikan sebagai wilayah pemerintahan tingkat II sesuai yang tertuang dalam UU Nomor 29 Tahun 1959.¹⁵

Berdasarkan dari pemaparan latar belakang diatas, peneliti membahas “Penataan Administrasi Pangkajene di Masa Kolonial Sampai ke Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan 1911-1959”.

1.2.Batasan Masalah

Batasan masalah terdiri atas dua bagian yaitu Batasan temporal dan Batasan spasial. Batasan temporal mencakup waktu penulisan, pada tulisan ini dimulai pada tahun 1916 sesuai dengan *Stadblad* 1916 No.352 saat penetapan daerah

¹³ Muhammad Amir Bahtiar, *Sejarah Sulawesi Selatan Integrasi Kerajaan ke NKRI*, (Makassar: Pustaka Refleksi, 2021), hlm. 57.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 190.

¹⁵ Undang-Undang Republik Indonesia No 29 Tahun 1959. Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi. (Jakarta:1959, LN 1959 (74):25 hlm.TLN 1822:5 hlm).

Pangkajene sebagai Onderafdeeling dengan lima daerah Kekaraengan (Karaenschappen) hingga tahun 1959 pada saat Pangkajene ditetapkan sebagai pemerintah daerah tingkat II sesuai dalam UU No. 29 Tahun 1959. Batasan spasial adalah batasan wilayah penulisan yang mencakup daerah Onderafdeeling Pangkajene.

1.3.Rumusan Masalah

Setelah menguraikan berbagai permasalahan diatas maka penulis membuat rumusan masalah. Untuk menjawab rumusan masalah tersebut maka penulis mengurainya dalam 2 pertanyaan penelitian, sebagai berikut:

1. Bagaimana Tata Administrasi di Pangkajene pada masa Kolonial smpa awal kemerdekaan1916-1959?
2. Perubahan apa saja yang terjadi dengan perpindahan kekuasaan yang terjadi antara tahun 1916-1959?

1.4.Tujuan dan Manfaat

1.4.1. Tujuan

- 1.4.1.1. Tambahan pengetahuan mengenai tata administrasi Kolonial yang dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda tahun 1916-1959.
- 1.4.1.2.Tambahan pengetahuan mengenai dasar terbentuknya Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

1.4.2. Manfaat

- 1.4.2.1. Sebagai bahan informasi bagi perguruan tinggi.

1.4.2.2. Sebagai bahan informasi bagi civitas akademika dalam memperluas

Khasanah ilmu pengetahuan Sejarah Sulawesi Selatan pada umumnya dan Pangkep pada khususnya.

1.4.2.3. Memberikan tambahan pengetahuan pada pembaca mengenai tata

administrasi Kolonial yang dilakukan oleh Pemerintah Hindia Belanda di Pangkajene tahun 1916-1959

1.4.2.4. Agar pembaca dapat mengetahui mengenai dasar terbentuknya

Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

1.5. Tinjauan Pustaka

Penulisan ini menggunakan beberapa buku sebagai bahan penulisan. Dalam buku Perubahan Politik dan Hubungan Kekuasaan Makassar 1906-1942 yang ditulis oleh Edward L. Poelinggomang, memuat dengan sangat baik perubahan politik yang terjadi di Sulawesi Selatan pada umumnya dan Makassar pada khususnya dan hubungan kekuasaan yang terjadi. Buku ini menjelaskan mengenai keinginan Belanda dalam mengubah model kekuasaan dengan menghilangkan kekuasaan penguasa lokal atau kelompok yang ber pemerintahan sendiri sedikit demi sedikit dan membuat pemerintahan menjadi terpusat. Buku ini juga menjelaskan sedikit mengenai pembagian kekuasaan yang dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda.

Sejarah Gowa yang disusun oleh Abd. Razak Daeng Patunru menuliskan bagaimana perang kekuasaan yang terjadi di Sulawesi Selatan khususnya Kerajaan Gowa, banyak memuat mengenai perselisihan Kerajaan Gowa dan Bone, juga menjelaskan bagaimana perjalanan Perang Makassar yang terjadi antara Kerajaan

Gowa dan sekutunya serta VOC dan sekutunya yang menghasilkan perjanjian Bungaya yang berisi 29 pasal. Juga menjelaskan perlawanan yang dilakukan pasca perang Makassar hingga ditaklukkannya secara penuh kerajaan Gowa pada tahun 1669.

Sejarah dan Politik Kerajaan Bugis (Kedinamikan Konfederasi Ajatappareng di Sulawesi Selatan) 1812-1906 berisi tentang bagaimana pengaruh politik kerajaan Gowa yang menurun setelah kalah perang dan sedikit menjelaskan bagaimana hubungan kekerabatan yang terjalin antara kerajaan-kerajaan yang ada di Sulawesi Selatan termasuk hubungan yang terjalin karna perkawinan antar bangsawan kerajaan. Juga menjelaskan bagaimana perlawanan-perlawanan yang dilakukan oleh penguasa-penguasa lokal baik itu masa VOC dan juga masuknya pemerintah Hindia Belanda setelah VOC bangkrut.

Kuasa Penjajah (Imprealisme Belanda di Kerajaan Bone 1906-1930) karangan M. Thamrin Mattulada memberikan pengetahuan mengenai pembagian kategori penataan wilayah yang dilakukan oleh Belanda pada masa perjanjian Bungaya berlaku. Penataan wilayah dikategorikan menjadi tiga, yaitu: Wilayah pemerintahan langsung, kerajaan pinjaman dan sekutu.

Mozaik Sejarah Sulawesi Selatan Sulawesi Barat yang ditulis oleh Dr. Edward L. Poelinggomang memberikan penjelasan mengenai bagaimana sejarah pembagian wilayah di Norder Distrikten pada abad 19.

Buku Bingkisan Patunru Sejarah Lokal Sulawesi Selatan yang di karang oleh Abdul Razak Daeng Patunru dapat menjelaskan pembagian wilayah Kekaraengan yang ada di Pangkajene pada awal abad ke 20 semasa pemerintah Hindia Belanda

Mengeluarkan *Staadblad* 1916 No.352 dengan perubahan itu di jelaskan dengan baik pembagian wilayah sampai pada tahapan kampung-kampung.

Dalam Buku Sejarah Sulawesi Selatan Jilid 2 yang ditulis oleh Dr. Edward L. Poelinggomang, Suriadi Mappangara dkk berisi tentang bagaimana masa Jepang masuk dan mengalahkan Angkatan Perang Hindia Belanda serta bagaimana pemerintahan Jepang mengelola wilayah yang telah ditaklukkannya itu melalui piagam penyerahan tanpa syarat di Kalijati.

Penulis juga mengunakan beberpaa sumber dari internet untuk dapat memahami bagaimana Kabupaten Pangkep di masa sekarang seperti yang dilihat dari situs kabupaten Pangkep ataupun situs bpk pangkep.

1.6. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode sejarah yang terdiri dari empat langkah yaitu heuristic atau pengumpulan sumber, kritik sumber, interpretasi dan historiografi atau penulisan.¹⁶

Heuristic atau pengumpulan sumber merupakan tahap pencarian sumber dan pengumpulan data, sumber-sumber yang dikumpulkan berupa sumber primer dan sumber sekunder. Pada tahap ini, penulis mendapat beberapa sumber sekunder seperti berupa buku.

Sumber primer yang digunakan dari koleksi Ministerie van Kolonian ditelusuri dari laman *Nationnalarchief.nl*. Laporan pejabat Asisten Residen W. C. Van Der Meulen mengenai *Norder Districten*. Penulis juga akan menggunakan *Staadblaad*

¹⁶ Kuntowijoyo, *Sejarah Kuantitatif*, (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2003), hlm. 219.

1916 No. 352 dan UU No. 29 tahun 1959. sumber sekunder berupa buku yang diperoleh dari koleksi pribadi, perpustakaan, dan pemberian teman.

Tahap berikutnya verifikasi atau kritik sumber. Tahapan ini dilakukan dengan menyeleksi sumber primer maupun sumber sekunder yang telah terkumpul dengan tujuan mendapatkan data yang sesuai dengan konteks penelitian. Penilaian atau pengujian terhadap bahan-bahan sumber tersebut dari sudut pandang nilai kenyataannya (kebenarannya) semata-mata merupakan langkah yang sangat penting sehingga sering dikatakan bahwa seluruh proses dari metode sejarah disebut sebagai kritisme sejarah.

Tahapan berikutnya adalah interpretasi. Tahapan ini merupakan bagian penting menafsirkan sumber-sumber tersebut, lalu dianalisa berdasarkan sudut pandang yang subjektif mungkin melalui sumber yang relevan.

Tahapan historiografi adalah tahapan yang terakhir. Tahap ini merupakan penyusunan sumber-sumber sejarah dalam bentuk tulisan yang dirangkum menjadi satu karya ilmiah yang berjudul “Penataan Administrasi Pangkajene di Masa Kolonial Sampai ke Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan 1916-1959”.

1.7.Sistematika Penulisan

Penjelasan mengenai “Penataan Administrasi Pangkajene di Masa Kolonial Sampai ke Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan 1911-1959”, penulis menguraikan dari umum ke khusus yakni bagaimana Sulawesi Selatan menjadi wilayah kekuasaan VOC yang termasuk di dalamnya adalah wilayah Pangkajene menjadi wilayah pemerintahan Inagsung setelah perjanjian Bungaya 1667. Kemudian atas dasar perjanjian itu, pada 1824 pemerintah Hindia Belanda

menggunakannya Kembali untuk melegitimasi kekuasaannya dengan membuat perjanjian Bungaya yang di perbarui dan sedikit merubah tatanan administrasi sebelumnya. Pangkajene sendiri menjadi wilayah Onderafdeeling dibawah Afdeeling Maros. Kemudian pada awal abad ke-20, pemerintah Hindia Belanda Kembali merubah tatanan administrasi yang telah dibuatnya dengan wilayah Pangkajene dimasukkan ke Afdeeling Makassar. Lalu pada masa pemerintahan Jepang yang tidak banyak mengubah susunan pemerintahan namun terdapat perubahan nama yang di bawa oleh Jepang.hingga pada akhirnya di bawah pemerintahan Indonesia, wilayah Pangkajene di jadikan sebagai wilayah Kabupaten dengan nama Pangakajene dan Kepulauan dan menjadi daerah pemerintah tingkat II pada 1959.

Sistematika penulisan pada tulisan ini terbagi kedalam lima bab. Bab pertama adalah pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, tijakan Pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Pada bab kedua membahas mengenai Pangkajene dan Kepulauan dalam lintasan sejarah yang berisi tentang Pemerintahan Kerajaan Siang yang merupakan suatu bentuk eksistensi dari Pangkajene dalam masa kerajaan meskipun hanya berupa wilayah dari Kekaraengan Pangkajene itu senditi. Namun, dari sini dapat ditarik bagaimana keberadaan Pangkajene itu sudah ada sebelum bangsa Eropa melakukan penjelajahan. Setelah itu meredupnya Kerajaan Siang yang menjadikannya Palili di bawah Kerajaan Gowa pada abad ke-16. Sebagai sebuah kerajaan yang bercorak maritim dan ikut andil dalam kekuatan politik di daerah

Sulawesi Selatan. Selanjutnya, Pangkajene dalam pengawasan VOC merupakan masa dimana wilayah Pangkajene mulai menjadi wilayah pemerintahan langsung oleh bangsa Belanda. Pada periode ini menjadi awal perubahan politik yang terjadi di Sulawesi Selatan dengan bangsa Eropa menjadi ikut serta dalam pemerintahan. Terakhir pada bab ini menjelaskan bagaimana Pangkajene sebagai suatu wilayah pemerintahan langsung tetap terikat dengan Perjanjian Bungaya yang di legitimasi Kembali oleh bangsa Belanda untuk membentuk pemerintahan Hindia Belanda di Sulawesi Selatan.

Pada bab tiga akan membahas mengenai penataan di wilayah Pangkajene yang terjadi pada masa awal abad ke-20. Keberadaan politik etis yang sedikit merubah pandangan bangsa Eropa dalam memerintah membuatnya berkeinginan untuk merubah tatanan administrasi yang ada di Sulawesi Selatan. Puncaknya pemerintah Hindia Belanda saat itu menghilangkan beberapa kesepakatan sebelumnya dengan menyodorkan *Korte Verklaaring* sehingga semua wilayah yang berada di Sulawesi Selatan seutuhnya menjadi wilayah pemerintahan langsung dan menghilangkan istilah *Gouvernement Landen* sehingga tata administrasi ikut berubah dan menjadikan wilayah Pangkajene menjadi *Onderafdeling* dibawah *Afdeeling* Makassar. yang kedua pada bab ini akan membahas mengenai pemerintahan Jepang yang mengambil alih kekuasaan Hindia Belanda setelah mengalahkannya dalam perang pada 1942. Meskipun tidak memiliki perubahan yang besar, pada periode ini, hanya terdapat perubahan nama pada penanggung jawab wilayah seperti istilah Residen Menjadi Gun Kanrikan.

Pada bab keempat akan berisi mengenai Pangkajene setelah kemerdekaan. Dimulai dari masa Negara Indonesia Timur, kemudian memasuki wilayah Republik Indonesia Serikat, hingga pada akhirnya di masa Negara Kesatuan Republik Indonesia pada saat wilayah Pangkajene dijadikan suatu wilayah Pemerinthan Tingkat II dengan nama Pangkajene dan Kepulauan.

Pada bab kelima atau terakhir berisi mengenai kesimpulan dan Penutup dari tulisan ini.

BAB II

PANGKEP DALAM LINTASAN SEJARAH

2.1 Eksistensi Kerajaan Siang

Di Sulawesi Selatan keberadaan Siang kuno dalam berbagai sumber telah diungkapkan di era abad ke-16. Demikian halnya pada sumber berita pendukung, yaitu dari pengelana-pengelana Eropa jelas diketahui bahwa kerajaan Siang sudah berkembang sebelum Sulawesi Selatan memasuki periode Islamisasi. Perihal toponimi Siang sudah diungkapkan pada beberapa sumber, Siang sebagai zona matahari terbenam kerana wilayahnya berada di sisi barat kaki Sulawesi Selatan. Sebagai kerajaan induk, kerajaan Siang pada masa lampau mencakup 24 kampung tua, yaitu Sengkaya, Bontorannu, Bajoe, Talappasa, Bontomate'ne, Bontolowa, Sambunjawa, Paranggi, Pasui, Kajuara, Matojeng, Ujung Loe, Bontote'ne, Lessang, Sabila, Belaya, Bu'nea, Ma'duntu, Mattampa, Pacce'lang, Baru-Baru, Male'leng, Barasa, dan Barana.¹⁷

Tome Pires yang pernah menetap di Malaka pada tahun 1516 bergiat mengumpulkan keterangan dari para pedagang tentang kegiatan perniagaan di Kawasan itu. Keterangan yang dikumpulkan itu tercatat pula kegiatan pelayaran niaga penduduk dari kawasan yang ketika itu dikenal dengan nama Pulau-pulau Makassar dan diketahuinya jalur pelayaran baru yang lebih singkat untuk memasuki Maluku yaitu jalur melalui Kepulauan itu.

¹⁷ Muhlis Hadrawi, Nuraedar Agus, takdir Isao dan Basiah, *jejak kerajaan Siang-barasa berdasarkan sumber lontara, (asian jurnal en environment, history and heritage*, (December 2019; Volume 3, Issue 2, p. 245-255), hlm 247

Keterangan itu memberikan dorongan kepada pedagang Portugis untuk mengalihkan jalur pelayaran mereka ke Maluku, selama ini menggunakan jalur pelayaran selatan melalui Pulau-pulau Makassar. Jalur pertama adalah memilih menelusuri pesisir utara Kalimantan untuk memasuki kawasan jaringan perdagangan Sulu, kemudian memasuki pulau rempah-rempah. Dalam kegiatan pelayaran niaga itu sebagian armada niaga tersesat memasuki wilayah Sulawesi Selatan, seperti armada niaga yang dipimpin oleh Jorge de Castro yang mendarat di Somba Opu. Keterangan De Castro itu kemudian merubah pilihan jalur pelayaran pedagang Portugis. Mereka mulai menelusuri pelabuhan-pelabuhan pesisir barat Sulawesi dalam pelayaran mereka ke Maluku itu. Dari catatan pelayaran niaga pedagang Portugis inilah mulai diperoleh keterangan tentang kota pelabuhan-kota pelabuhan di Sulawesi seperti: Qarasi, Tallo, Siang, Bacokiki, Suppa, Sidenreng, Napo (Balanipa), Kaili (Donggala) pada pesisir barat pulau Sulawesi dan Buton, Tomboku, Toli-toli dan Banggai pada pesisir timurnya, Menado pada pesisir utara dan Selayar.¹⁸

Dalam buku yang ditulis Perlas dengan judul *Manusia Bugis*, di pantai barat dan barat daya Sulawesi, ada tiga kerajaan lain yang pada 1540-an, masih bersekutu satu sama lain dan tampaknya telah memainkan peran penting dalam waktu singkat. Kerajaan Suppa', satu-satunya yang dicantumkan dalam *La Galigo*, mempertahankan kendali Wewang Nriwu' terhadap jalan masuk sebelah barat menuju Sungai Saddang dan dataran tengah yang didiami orang Bugis. Sedangkan

¹⁸ Mukhlis P, Edwarl Poelinggomang, dkk, *Sejarah Kebudayaan Sulawesi*, (Jakarta: Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional, 1995), hlm. 41-42.

Kerajaan Siang, yang terletak didekat Pangkajene sekarang, menurut tradisi lisan setempat, tampaknya telah memperluas pengaruh ke daerah lain, seperti Pujananti atau Sunra, baik di pantai barat daya semenanjung (yang kemudian dikuasai Goa), maupun ke daerah penghasil kayu cendana di sekitar Palu, di bagian barat laut Sulawesi. Sementara itu, Bantaeng mungkin sudah memiliki hubungan khusus dengan Jawa, dengan disebutnya daerah itu dalam *Negarakertagama* dan dengan adanya nama beberapa tempat di pantai itu yang berbau jawa.¹⁹

Perekonomian tradisional Sulawesi Selatan bertumpu pada ekspor produk-produk langka, sehingga perdagangan mudah dikendalikan oleh kalangan bangsawan. Pada abad ke-15, perekonomian terutama bergerak disektor pertanian. Agar bisa berkuasa, orang harus mampu menguasai sentra-sentra produksi beras yang wilayahnya kian bertambah. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu sistem pemerintahan yang mencakup penghubung antara raja dan rakyat, serta bentuk hubungan yang baru di antara mereka. Meski demikian, perdagangan tetap merupakan hal penting bagi Sulawesi Selatan. Setelah kerajaan Malaka menggantikan Kerajaan Melayu Sumatera sebagai pusat perdagangan pada awal abad ke-15, Sulawesi Selatan pun berusaha memulihkan pula perekonomiannya dengan memulai mengadakan hubungan langsung dengan emporium baru itu. Hal tersebut meningkatkan kembali kemakmuran, kaum raja, meski saat itu perdagangan bukan lagi satu-satunya sumber kekayaan mereka. Akibatnya

¹⁹ Christian Pelras, *Manusia Bugis*, (Jakarta: Penerbit Nalar, 2006), hlm. 123.

mungkin lebih tampak di pantai barat, khususnya di Suppa' dan Siang yang menjadi titik utama pemukiman para pedagang Melayu.²⁰

Pada masa itu, peristiwa yang tidak kalah pentingnya terjadi pula di pantai barat dan selatan semenanjung. Kekuatan utama orang Makassar mungkin masih dipegang oleh kerajaan Siang di pesisir barat dan kerajaan Bantaeng yang sedikit banyak mungkin masih berada di bawah pengaruh Luwu di pesisir Selatan. Akan tetapi, dua kerajaan kembar Makassar, yaitu Goa dan Tallo, sudah mulai berkembang pesat.²¹

2.2. Palili Kerajaan Gowa

Suatu perkembangan baru terjadi pada abad ke-15, yaitu tampilnya beberapa kerajaan kecil di pesisir barat jazirah selatan dalam dunia kemaritiman. Kerajaan Mandar mulai tampil bergiat mengawasi jalur pelayaran ke arah utara, diberitakan bahwa Kaili dan Gorontalo berhasil di bawah pengaruh kekuasaannya. Gorontalo dalam perkembangan kemudian ketika Kerajaan Makassar semakin luas pengaruh kekuasaannya, diserahkan pengawasannya kepada Kerajaan Makassar. Sementara di pesisir bagian selatan tampil Kerajaan Siang memegang hegemoni ke arah kawasan selatan.²²

Ketika Portugis Kembali menjalin hubungan dengan Sulawesi Selatan pada 1559, situasi politik telah berubah sangat drastis. Antara 1547 dan 1569, setelah Daeng Matanre Tumapa'risi' Kallona mangkat, Goa melanjutkan kebijakan ekspansinya di bawah pimpinan putranya Manrio Gau'Tunipalangga. Kerajaan Goa

²⁰ *Ibid.*, hlm. 132.

²¹ *Ibid.*, hlm 136.

²² Mukhlis P., Edwarl Poelinggomang, dkk, *Sejarah ...* (1995: 45).

berhasil menundukkan sekutu Portugis yang juga sekutu Sidenreng di pantai barat-Siang, Suppa, Alitta, Sawitto', dan Bacukiki' dengan kemungkinan besar meliputi pula kerajaan-kerajaan bawahan Siang di Pesisir Mandar dan di sekitar Teluk Kaili.²³

Kedudukan kota Siang sebagai pintu pertemuan dua kawasan untuk kegiatan niaga, di wilayah Bugis di utara dan Makassar di Selatan, akhirnya menjadi incaran Gowa yang pada abad ke-16 yang tampil agresif mencamplok satu demi satu wilayah sekitarnya. Diprediksikan pada tahun 1565 Siang menemui nasib malang oleh aneksasi Gowa yang pada masa itu di bawah pemerintahan Karaeng Tumaparrisi Kallonna. Naskah Lontara mencatat peristiwa penaklukan yang dilakukan kerajaan Gowa ke atas kerajaan-kerajaan Bugis dan Makassar pada pertengahan abad ke-16 sampai separuh awal abad ke-17 itu secara rinci. Penaklukan Gowa atas kerajaan-kerajaan tetangganya bermula pada masa pemerintahan Karaeng Tumaparrisi Kallaonna (1510-1545) kemudian dilanjutkan oleh Karaeng Tunipallangga (1546-1565). Peristiwa penaklukan kerajaan Siang masa Tomaparrisi' Kallonna telah dicatat dalam naskah Lontara yang disajikan terjemahannya sebagai berikut:

“Pasal. Yang menjelaskan jumlah wanuwa yang direbut Karaéng Gowa bernama Tomaparrisi' Kallonna/ Pertama Garessi'/ Kedua Kantingang/ Ketiga Parigi/ Keempat Siyang/ Kelima Sidenre Manai'/ Keenam Lembang/ Ketujuh merebut pusaka Bulukumba/ Kedelapan Selajar/ Kesembilan mengalahkan Pannaikang/ Kesepuluh Madello/ Kesebelas Céppaga/

²³ Christian Pelras, *Manusia Bugis* (2006: 155).

Keduabelas Maros dan Polombangkeng” (Sumber: Lontara Gowa, hlm. 85 dalam jurnal Muhlis Hadrawi, dkk yang berjudul *Jejak Kerajaan Siang-Barasa Berdasarkan Sumber Lontara* (Asian Jurnal en Environment, History and Heritage (2019: 247))

Gerakan ekspansi kerajaan Gowa telah berhasil mengalahkan puluhan kerajaan besar dan kecil di wilayah Makassar dan Bugis. Dalam catatan naskah Lontara di atas dinyatakan bahawa Karaeng Tumaparrisi Kallaonna (1510-1546) telah menawan sebanyak 48 kerajaan Makassar dan Bugis, baik kerajaan besar, maupun kerajaan kecil. Salah satu nama kerajaan yang ditaklukkan Karaeng Tunipallangga itu adalah Siang.²⁴

2.3. Pangkajene Dalam Pengawasan VOC

Jazirah selatan Pulau Sulawesi (Sulawesi Selatan) di masa lampau sampai awal abad ke-20, memiliki peran yang sangat dominan bila dibandingkan dengan bagian-bagian lain dari pulau itu, dalam bidang politik, ekonomi maupun kebudayaan. Seperti telah diketahui bahwa wilayah kekuasaan kerajaan Gowa pada pertengahan abad ke-17 meliputi seluruh Sulawesi, Kalimantan Timur dan Utara, dan sebagian dari Nusa Tenggara dan Maluku. Dalam bidang ekonomi tampak dengan adanya aktivitas pelayaran dan perdagangan suku Bugis dan Makassar selama abad ke-16 sampai awal abad ke-20. Wilayah pelayaran mereka meliputi hampir seluruh Nusantara.²⁵

²⁴ Muhlis Hadrawi, Nuraedar Agus, takdir Isao dan Basiah, *jejak kerajaan Siang-barasa ...* (2019: 248)

²⁵ Mukhlis P, Edward Poelinggomang, dkk, *Sejarah Kebudayaan Sulawesi ...* (1995: 73-74).

Kemajuan Makassar pada paruh kedua abad ke-17 itu dinyatakan oleh Anthony Reid sebagai "kisah kemajuan dan keberhasilan yang luar biasa dalam sejarah Indonesia". Kemajuan dan keberhasilan yang dicapai itu sirna setelah Makassar berhasil direbut oleh VOC pada tahun 1669.²⁶ Pada mulanya perjanjian ini dilakukan di tempat yang bernama Bungaya dekat Barombong pada 18 November 1667. Namun, masih terdapat perlawanan-perlawanan yang dilakukan oleh Kerajaan Gowa, terutama bangsawan-bangsawan yang tidak mau menerima kekalahan dan tidak mau menjadi jajahan dari VOC hingga pada 1669 kerajaan Gowa kalah secara utuh dan menghilangkan perlawanan-perlawanannya.²⁷

Berdasarkan Perjanjian Bungaya, daerah-daerah yang diduduki oleh pasukan VOC pada waktu perang Makassar dinyatakan berada di bawah kekuasaannya. Dalam Buku Abdul Razak Daeng Patunru yang berjudul Sejarah Gowa, legitimasi dari penguasaan itu didasarkan yang ada pada pasal 20 perjanjian Bungaya.²⁸ Jika diperhatikan pengaturan wilayahnya, wilayah yang berada di wilayah kekuasaan VOC adalah daerah-daerah yang mengelilingi wilayah Kerajaan Makassar dan sebagai pagar batas kerajaan itu.²⁹ Pengaturan ini bertujuan untuk

²⁶ *Ibid.*, hlm. 45.

²⁷ Abd. Razak Daeng Patunru, *Sejarah Gowa*, (Makassar: Yayasan Kebudayaan Sulawesi Selatan, 1983), hlm. 51

²⁸ Pasal 20 perjanjian Bungaya Berbunyi "semua negeri yang dalam peperangan dialahkan oleh Kompeni Belanda bersama sekutu-sekutunya, terhitung mulai dari Bulu-Bulu sampai Bungaya akan menjadi dan tetap sebagai negeri-negeri milik yang telah dimenangkan oleh Kompeni Bersama sekutu-sekutunya menurut hukum perang; kemudian bilamana raja Bakkek dan raja Appanang datang, maka negeri-negeri tersebut akan diperlakukan sesuai dengan hak Kompeni atas daerah-daerah di sebelah utara Makassar". (*Ibid.*, hlm. 54).

²⁹ Pada bagian timur terdapat wilayah kekuasaan Kompeni yang disebut Distrik-Dsitrik Bagian Timur (*Oost Districten*) dan Bulukumba dan Bhontain, pada bagian barat di batasi oleh Wilayah Makassar, pada bagian utara dibatasi oleh

menciptakan benteng penghalang bagi usaha kegiatan Kerajaan Makassar di bidang pelayaran dan perdagangan maritim dan usaha perluasan pengaruh kekuasaan.³⁰

Pada masa VOC, secara de jure wilayah Sulawesi Selatan secara keseluruhan adalah wilayah pengaruh kekuasaan Belanda, yang disebut Makassar dan daerah taklukannya (*Makassar en Onderherigheden*). Seluruh wilayah itu di bagi kedalam tiga kategori. Pertama adalah daerah yang berada dalam pemerintahan dan kekuasaan langsung yang disebut *Gouvernements Landen*, kedua adalah daerah kekuasaan pemerintah yang tidak di bawah pemerintahan langsung yang disebut Kerajaan Pinjaman (*leen Vorstendom*), dan terakhir adalah Kerajaan-kerajaan sekutu (*Bondgenootschappelijke Landen*).³¹ Bagi pemerintah Kompeni, kerajaan-kerajaan itu adalah kerajaan yang menjadi protektoratnya yang menjadikannya menjadi “pelindung dan perantara”.³² Struktur VOC di Makassar sama seperti struktur VOC di Asia. Gaastra berpendapat bahwa Makassar memiliki struktur yang sama dengan struktur VOC di Batavia. Keduanya sama-sama memiliki gubernur dan dewan untuk mengambil keputusan di otoritasnya.³³ Tata administrasi yang

wilayah Distrik-Distrik Bagian Utara (*Norder Districten*) dan pada bagian selatan dibatasi oleh Distrik-Distrik Bagian Selatan (*Zuider Districten*).

³⁰ Edward L. Poelinggomang, *Perubahan Politik dan Hubungan Kekuasaan Makassar 1906-1942*, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2004), hlm. 37-38.

³¹ *Gouvernements Landen* meliputi: Distrik Makassar, Distrik-distrik Bagian utara (Maros dan Pangkajene), Distrik-distrik Bagian Selatan (Bantaeng, Bulukumba dan Selayar); *Leen Vorstendom* meliputi: Kaili, Pare-Pare, Tanete, Tello, Wajo dan Laiwui; dan *Bondgenootschappelijke Landen* meliputi kerajaan Bone dan sekutunya.

³² M. Thamrin Mattulada, *Kuasa Penjajah Imprealisme Belanda di Kerajaan Bone 1906-1931*, (Makassar: Pustaka Saweri Gading, 2015), hlm. 31-32.

³³ Jajang Nurjaman, *Jaringan Informasi Dan Komunikasi Organisasi Voc Di Sulawesi (Makassar) 1735-1737: Studi Kasus Arsip Overgekomen Brieven en Papieren (OBP) sebagai Penghubung Vital Komunikasi VOC*, (Khazanah: Jurnal Pengembangan Kearsipan, 2019, Vol 12(1)), hlm. 77.

dilakukan di setujui oleh Gubernur Jenderal di Makassar dan setiap pergantian Raja atau pemimpin yang baru harus melewati persetujuan Gubernur Jenderal yang bertempat di Makassar. Kedudukan ini juga menempatkannya pada penyelesaian persoalan atau peradilan terutama yang berhubungan dengan urusan dagang dan permasalahan antar bangsawan.

2.4. Pangkajene dalam Pemerintahan Hindia Belanda 1824-1911

Pada permulaan abad ke-19, kedudukan Kompeni digantikan oleh pemerintah Hindia Belanda. Seluruh wilayah yang berada di bawah kekuasaan Kompeni berdasarkan perjanjian Bungaya menjadi milik Hindia Belanda. Untuk menata wilayah yang berada di bawah kekuasaannya, maka pada tahun 1824, pemerintah Hindia mengeluarkan satu aturan tata pemerintahan baru untuk wilayah Makassar yang mengatur baik aspek administratif maupun peradilan (*Nieuwe Organisatie*)³⁴, Belanda mengumumkan pengaturan itu dalam Lembaran Negara (*Staadblad*) 1824 No.31 a. Pemerintah Makassar dan Daerah Bawahan (*Gouvernement Makassar en Onderhorigheden*) di bagi dalam lima wilayah administrasi pemerintahan yaitu: Makassar, meliputi kota Pelabuhan Makassar, Fort Rotterdam, kota Vlaardingen dan kampung-kampung di sekitarnya dan pulau-pulau yang terletak di depan kota Pelabuhan Makassar; *Zuider Districten*, meliputi Distrik-Distrik Aing Towa, Bontolebang, Galesong, Polombangkeng, Sawakong, Mamuju, Balo, Lengese, Takalara, Topejawa, Lakatong; *Norder Districten* meliputi Distrik-Distrik Maros, Bontoa, Tangkutu, Tanralili, Sumbang, Rilaut,

³⁴ Dias Pradadimara, *Dibentuknya Negara Kolonial di Sulawesi bagian Selatan di Abad ke-19*, (Jurnal Lensa Budaya, Vol. 12. No. 2, Oktober 2017), hlm. 61.

Tomboro, Riraya, Sodiang, Malawa, Camba, Baloci, Laiya, Labuaya, Bungoro, Pangkajene, Bungo, Labakang, Marang, Kalukua, Sigeri dan Katene; Bulukumba dan Bhontain meliputi Distrik-Distrik Bhontain dan Tompobulu, Gantarang, Tala, Polewooi, Tanah Beru, Bontotanga, Lemo-Lemo, ujung Loe, Weiro, Langa-Langa, Tiro dan Bira; Selayar meliputi Distrik-Distrik Bonto Bangung, Tanete, Batang Mata, Bukiet, Mare-Mare, Bonea, Opa-Opa, Gantarang, Bulo-Bulo, Laiyolo, Banto Baros, Barang-Barang, Bangon dan Onto.³⁵ Dalam hal ini Distrik Baloci, Bungoro, Labakkang, Marang, Pangkajene dan Sigeri merupakan wilayah yang ada di Pangkajene sebagai bagian dari pemerintahan *Norer Districten*.

Dalam waktu yang bersamaan dengan penggodogan *Nieuwe Organisatie* 1824, disiapkan juga satu naskah perjanjian baru yang harus ditanda tangani oleh para penguasa lokal di wilayah ini yang kelak dikenal sebagai “Perjanjian Bungaya yang diperbaharui” (*vernieuwd Bongaijasch Contract* untuk teks lengkapnya bisa dilihat di Ikhtisar 1973: 263). Isi naskah perjanjian ini menegaskan kembali apa yang disebut sebagai “perdamaian, pertemanan dan persekutuan” (“*vrede, vrienden bondgenootschap*”) yang sudah diperjanjikan dalam Perjanjian Bungaya di tahun 1677 (ayat 24), antara, waktu itu, VOC dengan penguasa-penguasa lokal di Sulawesi bagian selatan. Dengan pernyataan tersebut maka dalam kedua perjanjian ini disiratkan adanya pengakuan kedaulatan para penguasa lokal meski dibatasi oleh ayat-ayat lainnya. Demikian pula sebagian besar isi Perjanjian 1824 tidak banyak berbeda dengan Perjanjian 1667 dengan beberapa pengecualian penting. Yang

³⁵ Edwar L. Poelinggomang, *Perubahan Politik dan ...* (2004: 40-41).

pertama, posisi Gowa sebagai pihak yang kalah dalam Perang Makassar dan segala kewajiban yang dibebankan kepadanya tidak lagi di sebutkan dalam Perjanjian 1824. Yang kedua (dan ini yang mengganggu pihak Kesultanan Bone) di ayat 3 disebutkan bahwa semua penguasa lokal yang menanda tangani perjanjian ini dianggap setara dan tidak ada yang lebih tinggi dari yang lain.³⁶

Di tahun 1848 pengaturan administratif dilanjutkan dimana Pemerintahan Makassar diganti namanya dengan Pemerintahan Celebes dan Daerah-daerah Tergantung (*Gouverenement van Celebes en Onderhoorigheden*) yang secara eksplisit menunjukkan wilayah yang diklaimnya meski pada prakteknya tidak mengubah wilayah yang dikelolanya, termasuk Sulawesi bagian selatan di dalamnya. Dengan pengaturan ini, secara lebih rinci lagi pembagian wilayah dilakukan dimana kini, dibagi menjadi 3 “kategori” wilayah yakni (1) wilayah pemerintah yang diperintah langsung, (2) wilayah pemerintah yang tak diperintah langsung, dan (3) daerah-daerah sekutu (*bondgenootschappelijke landen*). Wilayah kategori pertama hanya meliputi Distrik Makassar, Distrik-distrik Utara (*Noorderdistricten*), Bantaeng dan Bulukumba, dan Pulau Selayar, sedang kategori kedua meliputi wilayah Kaili (*Kajelie*), Pare-Pare, Tanette, Tallo, Wajo, dan Laiwui. Sedang mereka yang masuk dikategori ketiga, dianggap sebagai “sekutu” dengan dasar penandatanganan para penguasa wilayah-wilayah ini atas Perjanjian Bungaya yang diperbaharui dan termasuk di dalamnya Mandar, Toraja, Masenrempulu (*Massenre Boeloe*), Luwu, Ajattappareng (*Adja Tamparan*),

³⁶ Dias Pradadimara, *Dibentuknya Negara Kolonial . . .* (2017: 61).

Bacukiki, Nepo, Labaso, Barru, Soppeng, Bone, Gowa, Sandrabone, Turatea, Buton, Pulau Sumbawa, dan Pulau Flores.³⁷

Setelah penanda tangan Perjanjian Bungaya yang diperbaharui di tahun 1824 (meski Kesultanan Bone baru menandatangani tahun 1838), maka sesuai perjanjian, para penguasa lokal harus menanda tangani kontrak (*Akte van Bevestiging* atau Akta Pengakuan) dengan Pemerintah Hindia apabila terjadi pergantian pejabat. Mereka yang baru diangkat sebagai penguasa baru untuk menggantikan mereka yang entah karena meninggal atau sebab-sebab lain harus turun, harus menanda tangani “ulang” perjanjian -perjanjian ini.³⁸

³⁷ *Ibid.*, hlm. 62-63.

³⁸ *Ibid.*, hlm. 66.